

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia. Prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan membangun landasan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan dilakukan melalui pembangunan dibidang ekonomi, sarana dan prasarana, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Desentralisasi dari pusat kedaerah merupakan sebuah tonggak utama dalam menjalankan semangat otonomi yang kian menggema di

Tanah Air. Otonomi yang dimaksud adalah sebuah kepercayaan untuk mengelola wilayahnya masing-masing berlandaskan paham daerah. Dengan konsep ini tentu diharapkan agar daerah yang berotonomi akan semakin dekat dengan masyarakat. Bukan hanya dalam hal kewenangan pemerintah daerah mendapat limpahan wewenang dari pemerintah pusat namun juga dalam hal keuangan pemerintah daerah juga mendapat kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya sektor ekonomi yang dimiliki.

Dengan adanya otonomi daerah yang memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki tentu akan menurunkan angka kemiskinan yang dimiliki serta menyerap tenaga kerja yang ada di daerah melalui pembangunan yang ada, yang tentu dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang disahkan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan pembiayaan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu” Penelitian ini menggunakan data periode 2009-2014, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. Dengan menggunakan metode analisis rumus Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur keeratan (kekuatan) hubungan. Nilai koefisien determinasi ganda (R^2) sebesar 0.952 ini berarti variabel Dana Alokasi Khusus (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Umum (X_3) mempunyai kontribusi sebesar 95,2% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Y) di Kabupaten Luwu. Sisanya merupakan faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil uji F, dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,297 > 4,28$). Dari hasil analisis didapatkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2), dan Dana Alokasi Umum

(X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y) di Kabupaten Luwu. Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Merangin selalu berupaya menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah selalu terus meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dalam rangka mendukung sector belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat kabupaten merangin.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah pada dasarnya mengandung tiga aspek : Pertama, sebagai pelimpahan tanggung jawab pusat kepada daerah dalam hal pelaksana dan pengambil keputusan administrasi.

Kabupaten Merangin Merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi jambi yang melaksanakan Otonomi Daerah maka diperlukan sumber-sumber keungan yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat. Adapun realisasi Pendapatan Asli Dearah dan Dana Perimbangan dan APBD Kabupaten Merangin Tahun 2011-2020 tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	APBD (Rp)
2011	Rp. 39.647.952.627	Rp. 564.504.923.388	Rp. 707.018.460.976
2012	Rp. 30.112.526.352	Rp. 669.098.687.585	Rp. 794.253.587.215
2013	Rp. 44.396.136.300	Rp. 755.507.901.790	Rp. 925.553.738.915
2014	Rp. 67.200.333.089	Rp. 796.826.317.818	Rp .1.039.099.785.395
2015	Rp. 76.949.402.914	Rp. 851.727.173.069	Rp. 1.158.516.358.139
2016	Rp. 56.873.112.297	Rp. 1.038.315.600.788	Rp. 1.293.011.654.083
2017	Rp. 86.702.264.469	Rp. 979.514.011.117	Rp. 1.337.425.392.083
2018	Rp. 89.304.559.028	Rp. 978.236.523.005	Rp. 1.334.262.666.036
2019	Rp.106.160.970.250	Rp. 1.039.700.153.727	Rp. 1.508.597.828.736
2020	Rp. 100.322.387.750	Rp. 959.888.246.092	Rp. 1.370.620.154.058

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Pada tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin mengalami Fluktuasi,dapat dilihat pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 39.647.952.627 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar Rp. . 30.112.526.352 dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya.

Pada tabel Dana Perimbangan pada Tahun pada tahun 2011 sebesar Rp. 564.504.923.388 dan dapat dilihat pada tahun berikutnya Dana Perimbangan terus meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 979.514.011.117 2018 sebesar Rp. 978.236.523.005 Penurunan pada tahun 2017 dan 2018 disebabkan



efektivitas belanja daerah masih rendah. Kemandirian fiskal APBD belum optimal. Terlihat dari besarnya saldo pemerintah daerah di perbankan sehingga kontraproduktif terhadap akselerasi pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.

Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 707.018.460.976 dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu Rp. . 1.370.620.154.058.

Berdasarkan penelitian awal pada Direktorat Jenderal Keuangan (DJPK) Kota Sungai Penuh, terdapat fenomena yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut bahwa terjadi peneurunan pada dana perimbangan pada tahun 2017 dan 2018 yang disebabkan efektivitas belanja daerah masih rendah dan Kemandirian fiskal APBD belum optimal pada Tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara parsial dan simultan di Kabupaten Merangin Tahun 2011-2020?
2. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara parsial dan simultan di Kabupaten Merangin Tahun 2011-2020 secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah, maka ditinjau dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Merangin Tahun 2011-2020?
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011-2020?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat akademis

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi pustakan dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi pemerintah kabupaten merangin dalam mengambil kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi pendapatan dan belanja daerah.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan pengetahuan yang dilandasi konsep teori ilmiah dalam memecahkan masalah sosial di kehidupan masyarakat.

